

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang diteliti dapat memberikan kontribusi yang berbeda-beda bagi peneliti, mulai dari aspek proses hingga hasil serta pemahaman akan keberadaan dan kedudukan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam memperluas materi yang disiapkan peneliti untuk penelitian ini dan menghindari asumsi kesamaan dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Siti Rahayu, 2019, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa meskipun belum maksimal dalam perencanaan Dana Desa. Perencanaan Dana Desa masih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Kemudian Penelitian yang dilakukan Yamulia Hulu, dkk, 2018, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”,

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan Yunita Dewi Rahmawati, dkk, 2021, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan”, Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Mulya Subur belum menerapkan asas pengelolaan Dana Desa secara maksimal. Hal ini dikarenakan pada penerapan asas partisipatif masih terkendala dengan kurangnya dalam membuka ruang bagi peran serta masyarakat. Selain itu, partisipasi dari masyarakat masih bersifat pasif. Dalam pengelolaan Dana Desa juga masih memfokuskan pada kegiatan pembangunan fisik.

Kemudian Penelitian yang dilakukan Firmansyah, dkk, 2023, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa”,

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, warga desa tidak berpartisipasi aktif, dan aparat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal pada camat, namun tidak pada masyarakat desa sehingga tidak percaya pada aparat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan pada pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan sampah, sedangkan pemberdayaan non fisik terkait dengan aparatur pemerintahan desa dan pelatihan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Serta Penelitian yang dilakukan Kristoforus Mikhael Bouk, 2022, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan MasyarakatDesa” (Studi Di Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua”), Teknik pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberdayaan masyarakat, implementasi kebijakan dan efektivitas pengolahan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemandirian masyarakat desa. Koefisien jalur yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kesejahteraan adalah efektivitas pengolahan dana desa dan partisipasi masyarakat.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Fokus/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Rahayu, 2019	Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser	Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui metode purposive sampling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa meskipun belum maksimal dalam perencanaan Dana Desa. Perencanaan Dana Desa masih terhambat oleh sumber daya manusia yang rendah, diketahui dari hasil musrenbangdes yang monoton tiap tahunnya. Pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien
2	Yamulia Hulu, dkk, 2018	Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kampung Koya Koso Distrik Abepura, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi

					pemerintah desa dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).
3	Yunita Dewi Rahmawati, dkk, 2021	Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	DesaMulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Mulya Subur belum menerapkan asas pengelolaan Dana Desa secara maksimal. Hal ini dikarenakan pada penerapan asas partisipatif masih terkendala dengan kurangnya dalam membuka ruang bagi peran serta masyarakat. Selain itu, partisipasi dari masyarakat masih bersifat pasif. Dalam pengelolaan Dana Desa juga masih memfokuskan pada kegiatan pembangunan fisik
4	Firmansyah, dkk, 2023	Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, warga desa tidak berpartisipasi aktif, dan aparat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan melaksanakan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal pada camat, namun tidak pada masyarakat desa sehingga tidak percaya pada aparat pemerintah desa. Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan pada pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan sampah, sedangkan pemberdayaan non fisik terkait dengan aparatur pemerintahan desa

					dan pelatihan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
5	Kristoforus Mikhael Bouk, 2022	Evektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan MasyarakatDesa” (Studi Di Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua)	Desa Wanggar Pantai Kabupaten Nabire Papua	Teknik pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemberdayaan masyarakat, implementasi kebijakan dan efektivitas pengolahan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemandirian masyarakat desa. Koefisien jalur yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kesejahteraan adalah efektivitas pengolahan dana desa dan partisipasi masyarakat

Sumber : Diolah peneliti, 2024

Bersarkan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 tersebut di atas, persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai sebagai berikut :

Persamaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sama dengan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang ada di tabel 2.1.

Perbedaannya, Penelitian ini menggunakan Teori Manajemen dari George Terry, sedangkan pada penelitian terhadulu ada yang menggunakan

teori efektifitas, dan ada juga yang menggunakan teori pengelolaan Dana Desa.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Konsep Manajemen

a. Pengertian Pengelolaan

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno ménagement yang berarti seni melaksanakan dan mengorganisasi. Sedangkan secara terminologis, para ahli mengartikan manajemen dengan berbagai cara, antara lain:

Follet yang dikutip Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Menurut Stoner yang dikutip Wijayanti (2008:1), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia organisasi lainnya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Gulick dalam Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu yang berupaya secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menjadikan sistem ini lebih bermanfaat bagi umat manusia.

Schein (2008: 2) mengartikan manajemen sebagai suatu profesi. Menurutnya, manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk

bekerja secara profesional, ciri-cirinya adalah profesional mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, profesional memperoleh statusnya karena mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan profesional harus ditentukan oleh kode etik yang kuat. etika.

George R. Terry (2010: 1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan membimbing atau mengarahkan sekelompok orang menuju tujuan organisasi atau niat sebenarnya. Hal ini mencakup mengetahui apa yang harus dilakukan, menentukan bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas upaya yang telah dilakukan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan. (mengendalikan). Manajemen adalah suatu kegiatan; Penerapannya disebut mengelola dan orang yang melakukannya disebut manajer.

Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni *man, money, method, machine, market, material* dan *information*.

Man : Sumber daya manusia;

- 1) *Money* : Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- 2) *Method* : Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
- 3) *Machine* : Mesin atau alat untuk berproduksi;
- 4) *Material* : Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- 5) *Market* : Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi;
- 6) *Information* : Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

b. Fungsi Manajemen

Menurut George R. Terry (2010: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan):

1) *Planning* (Perencanaan)

a) Pengertian Perencanaan

Perencanaan merupakan penentuan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena mencakup pemilihan alternatif keputusan. Kemampuan memvisualisasikan dan melihat diperlukan ke depan guna merumuskan pola serangkaian tindakan di masa depan.

b) Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- (1) Menentukan tujuan perencanaan;

- (2) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan;
- (3) Mengembangkan alasan untuk kondisi masa depan;
- (4) Mengidentifikasi cara-cara untuk mencapai tujuan; Dan
- (5) Melaksanakan rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

c) Elemen Perencanaan

Perencanaan terdiri dari dua unsur penting yaitu sasaran dan rencana.

- (1) Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh seorang individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Tujuan sering juga disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen dalam mengambil keputusan dan menciptakan kriteria untuk mengukur pekerjaan.
- (2) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan ruang lingkup, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaan.

d) Unsur Perencanaan

Rencana yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang termasuk dalam unsur perencanaan, yaitu:

- (1) Tindakan apa yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan;

- (2) Mengapa tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dilakukannya tindakan;
- (3) Tindakan yang dilakukan yaitu menentukan tempat atau lokasi;
- (4) Kapan tindakan itu dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan;
- (5) Siapa yang akan melakukan tindakan, yaitu menentukan aktor yang akan melakukan tindakan; dan
- (6) Cara melaksanakan tindakan, yaitu menentukan cara pelaksanaan tindakan.

e) Klasifikasi perencanaan

Rencana dapat diklasifikasikan menjadi:

- (1) Rencana pembangunan. Rencana tersebut menunjukkan arah (secara grafis) tujuan lembaga atau perusahaan;
- (2) Rencana keuntungan. Jenis rencana ini biasanya terfokus pada keuntungan per produk atau kelompok produk yang diarahkan oleh manajer. Jadi semua rencana berusaha mengurangi pengeluaran untuk mencapai keuntungan maksimal;
- (3) Rencana pengguna. Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana memasarkan produk tertentu atau memasuki pasar dengan cara yang lebih baik; dan

(4) Rencana anggota manajemen. Rencana dirumuskan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan anggota manajemen yang unggul (terry, 1993: 60).

f) Jenis Perencanaan

Jenis perencanaan rincinya adalah sebagai berikut:

(1) Perencanaan jangka panjang (Short Range Plans), jangka waktu 5 tahun atau lebih;

(2) Perencanaan jangka pendek (Long Range Plans), jangka waktu 1 sampai dengan 2 tahun;

(3) Perencanaan strategis, yaitu kebutuhan jangka panjang dan penetapan secara komprehensif terhadap apa yang diarahkan;

(4) Perencanaan operasional, apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan perencanaan strategis untuk mencapai tujuan strategis;

(5) Perencanaan tetap, digunakan untuk kegiatan yang terjadi secara berulang-ulang (terus menerus); Dan

(6) Perencanaan sekali pakai, hanya digunakan sekali untuk situasi yang unik.

g) Dasar-dasar Perencanaan yang Baik

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi:

(1) Peramalan, proses pembuatan asumsi tentang apa yang akan terjadi di masa depan;

- (2) Penggunaan skenario, termasuk menentukan beberapa alternatif skenario atau kejadian di masa depan yang mungkin terjadi;
- (3) Benchmarking, perbandingan eksternal untuk mengevaluasi kinerja saat ini dengan lebih baik dan menentukan tindakan yang mungkin diambil di masa depan;
- (4) Partisipan dan keterlibatan, perencanaan semua orang yang mungkin mempengaruhi hasil perencanaan dan/atau akan membantu pelaksanaan rencana; dan
- (5) Penggunaan staf perencanaan, yang bertanggung jawab mengarahkan dan mengkoordinasikan sistem perencanaan organisasi secara keseluruhan atau salah satu komponen perencanaan utama.

h) Tujuan Perencanaan

- (1) Memberikan arahan baik kepada manajer maupun karyawan non-manajerial;
- (2) Mengurangi ketidakpastian;
- (3) Meminimalkan limbah; dan
- (4) Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

i) Sifat Rencana yang Baik

Suatu rencana dikatakan baik apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Penggunaan kata yang sederhana dan jelas;
- (2) Fleksibel, suatu rencana harus mampu menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya;
- (3) Stabilitas, setiap rencana tidak berubah setiap waktu, sehingga stabilitasnya harus dijaga;
- (4) Sedang dipertimbangkan; dan
- (5) Mencakup semua tindakan yang diperlukan, termasuk fungsi dalam organisasi.

2) ***Organizing (Pengorganisasian)***

a) Pengertian Pengorganisasian

Pengorganisasian berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai setiap tujuan dan tugas kelompok menjadi manajer (Terry & Rue, 2010: 82). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menata seluruh sumber daya yang diperlukan, termasuk manusia, agar pekerjaan yang diinginkan dapat terlaksana dengan sukses.

b) Karakteristik Organisasi

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- (1) Mempunyai maksud dan tujuan;
- (2) Mempunyai format dan aturan terlampir yang harus ditaati;
- (3) Adanya kerjasama dari sekelompok orang; dan
- (4) Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

c) Komponen organisasi

Ada empat komponen organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (Pekerjaan, Karyawan, Hubungan dan Lingkungan).

(1) Pekerjaan merupakan suatu fungsi yang harus dilaksanakan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

(2) Pegawai adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan suatu bagian tertentu dari keseluruhan pekerjaan.

(3) Hubungan penting dalam organisasi. Hubungan antara karyawan dan pekerjaannya, Interaksi antara pegawai yang satu dengan pegawai lainnya serta satuan kerja lain dan satuan kerja pegawai dengan satuan kerja lain merupakan hal yang sensitif.

(4) Lingkungan merupakan komponen akhir yang meliputi fasilitas fisik dan sasaran umum di lingkungan tempat pegawai melaksanakan tugasnya, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor pembentuk lingkungan.

d) Tujuan organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan mengenai kondisi atau situasi yang tidak ada pada saat ini, namun

dimaksudkan untuk dicapai pada masa yang akan datang melalui kegiatan organisasi (Handoko, 1995:109).

e) Prinsip-prinsip organisasi

Williams (1965:85) mengemukakan pendapat bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi:

- (1) Prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas;
- (2) Prinsip skala hierarki;
- (3) Asas kesatuan komando;
- (4) Asas pendeklegasian wewenang;
- (5) Prinsip tanggung jawab;
- (6) Prinsip pembagian kerja;
- (7) Prinsip rentang kendali;
- (8) Prinsip fungsional;
- (9) Prinsip pemisahan;
- (10) Prinsip keseimbangan;
- (11) Prinsip fleksibilitas; dan
- (12) Prinsip kepemimpinan.

f) Manfaat pengorganisasian

Pengorganisasian mempunyai manfaat sebagai berikut:

- (1) Dapat lebih menekankan hubungan antar anggota yang satu dengan yang lain;

- (2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab;
- (3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kedudukannya dalam struktur organisasi;
- (4) Pendeklegasian wewenang dalam organisasi dapat dilakukan secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang; dan
- (5) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga tujuan dapat dicapai dengan mudah.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Implementasi merupakan upaya menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mau dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama George R. Terry (1993:62).

4) *Controlling* (Pengawasan)

a) Pengertian *Controlling*

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan metode dan alat untuk memastikan bahwa rencana dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

b) Tahapan Pengawasan

Tahapan pengawasan terdiri dari:

- (1) menentukan standar;

- (2) menentukan ukuran pelaksanaan kegiatan;
- (3) pengukuran pelaksanaan kegiatan;
- (4) perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan; Dan
- (5) mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

c) Jenis Pengawasan

- (1) Pengendalian Feedforward dirancang untuk mengantisipasi permasalahan dan penyimpangan dari standar sasaran serta memungkinkan dilakukannya koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu selesai.
- (2) Pengendalian Konkuren adalah suatu proses dimana aspek-aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin keakuratan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (3) Pengendalian Umpan Balik mengukur hasil kegiatan yang telah dilakukan.

1.2.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi serta dilakukan secara teratur dan patuh kepada masyarakat. mendorong terciptanya good governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sedangkan Lili (2018) menyatakan alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten kepada desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan dana desa merupakan suatu kegiatan yang meliputi proses penatausahaan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap desa dan selanjutnya penggunaannya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa, yaitu:

- 1) Segala kegiatan yang dibiayai Dana Desa terprogram, dilaksanakan dan diawasi secara transparan sesuai dengan prinsip masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- 2) Semua kegiatan harus diakui menurut persyaratan manajerial, umum dan undang-undang.
- 3) Dana Desa dilaksanakan secara ekonomis, teratur dan terarah.
- 4) Kegiatan yang dibiayai Dana Desa benar-benar transparan dalam rangka menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan organisasi desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan warga masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah.

- 5) Dana Desa harus dituangkan dalam APBDes Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sedangkan menurut Ultafiah (2017), keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip ADD, yaitu:

- 1) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN.
- 2) Peraturan mengenai keuangan negara antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berkaitan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan kepada pemerintah dan juga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa peraturan pemerintah maupun undang-undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa

dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Peraturan ini mempunyai 5 tahapan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang baik yang harus dilaksanakan menurut ketentuan umum, antara lain sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan suatu proses pemikiran dan tekad yang matang untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara tepat waktu dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berjangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) berjangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun

berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2) Pelaksanaan

Pelaksana keuangan desa adalah suatu proses dimana peraturan desa yang telah ditetapkan sebelumnya tentang APBDes dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Seluruh pemasukan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Segala pendapatan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dalam melaksanakan keuangan desa, ada beberapa prinsip umum yang harus dipegang teguh yang meliputi pendapatan dan pengeluaran. Prinsip tersebut antara lain seluruh pemasukan dan pengeluaran desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Dalam prakteknya, bendahara desa dapat menyetorkan sejumlah uang ke kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang tunai yang disetor ke kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah suatu proses dimana seluruh kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam suatu buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditentukan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, penutupan buku setiap akhir bulan dengan tertib dan harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara merupakan tugas yang wajib dilaksanakan oleh bendahara. Bendahara Desa mencatat secara sistematis dan kronologis transaksi keuangan yang terjadi.

Untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a) Buku Kas Umum
- b) Buku Kas Asisten Pajak
- c) Buku Bank

Bendahara Desa mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas pada Buku Kas Umum. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pemungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus pendapatan pembiayaan terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. (BPKP, 2020:90).

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/laporan realisasi APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan akhir semester disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. (Permendari Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37).

Rincian laporannya adalah sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

- a) Laporan Semester Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

- a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa yang terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip, yaitu:

- a) Transparansi, keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses terhadap informasi seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan desa.

- b) Akuntabilitas, perwujudan kewajiban melaporkan atau mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta percepatan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang harus dilibatkan.
- d) Anggaran yang tertib dan disiplin, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang menjadi landasannya.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), kemudian ke Desa (ABPDes). Ada dua tahap pendistribusianya, yaitu sebagai berikut:

- a) Tahap I sebesar 60% dari Pagu Dana Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.
- b) Tahap II sebesar 40% dari Dana Desa Pagu, paling cepat bulan Agustus.

Selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima dalam APBD Kabupaten/Kota pada setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke Desa. Dana desa yang disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. Sedangkan penyaluran dana desa ke RKUD ke RKD

dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkannya dari APBD.

1.2.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sari, Ribawanto dan Said (2015) menyatakan bahwa faktor penghambat pengelolaan dana desa adalah:

- a) Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan
- b) Jumlah Dana Desa untuk menunjang operasional administrasi pemerintahan masih terbatas
- c) Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat

Sedangkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kendala, antara lain sebagai berikut:

- a) Sumber Daya Manusia
- b) Swadaya Komunitas
- c) Pengawasan Masyarakat
- d) Partisipasi masyarakat
- e) Perubahan Anggaran

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah jumlah anggaran dan sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia seperti masyarakat dan perangkat desa.

1.3 Kerangka Berfikir Penelitian

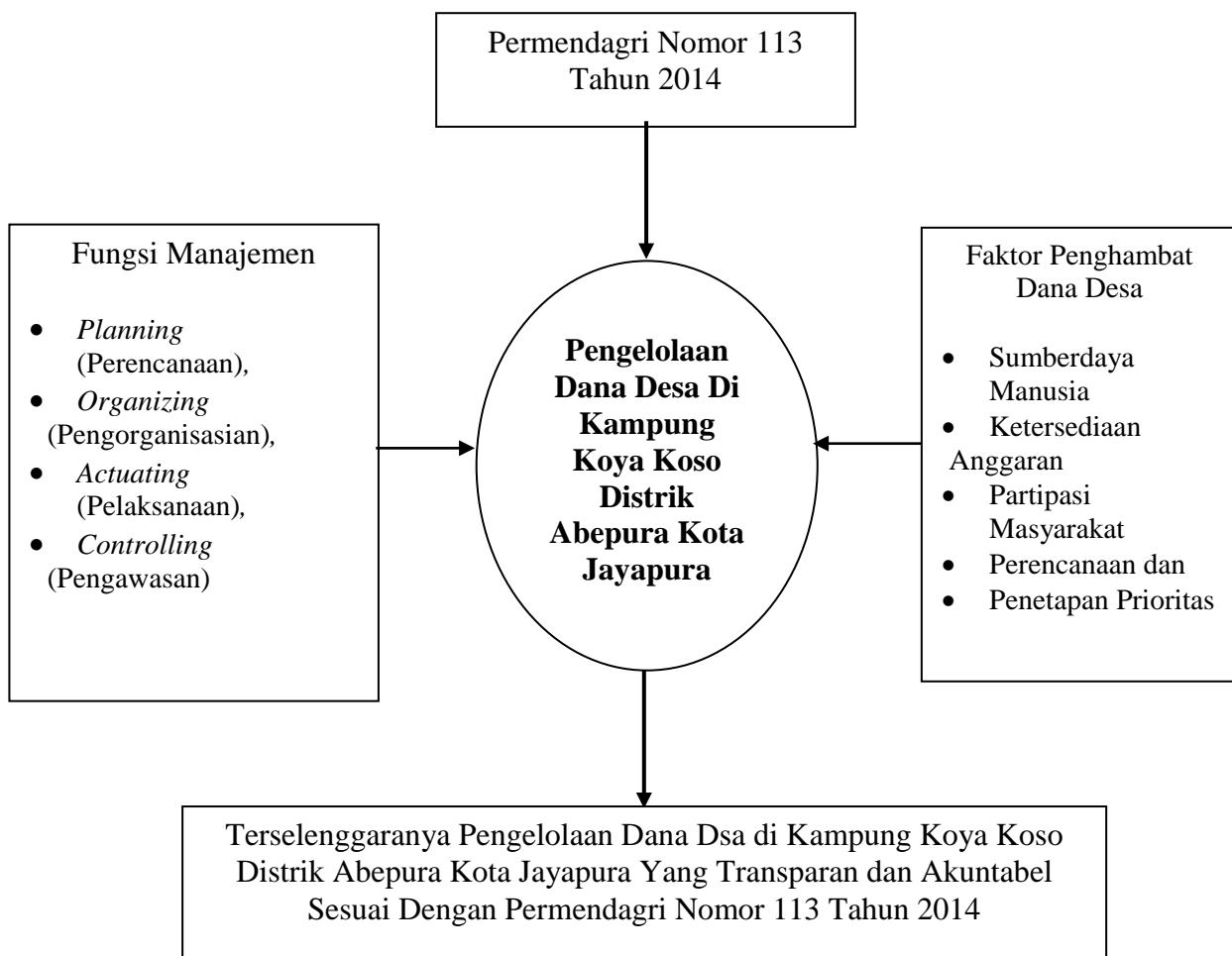
Kerangka berfikir adalah konseptual atau model teori yang saling berkaitan terhadap faktor-faktor yang telah dikenali sebagai masalah penting. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep yang disampaikan oleh George R. Terry (2010: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Dalam menggambarkan dan menganalisis pengelolaan Dana Desa yang ada di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.

Kemudian dalam pelaksanaannya tentunya tergadap beberapa faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa senagaimana yang disampaikan oleh Sari, Ribawanto dan Said (2015) menyatakan bahwa faktor penghambat pengelolaan dana desa adalah: Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, Jumlah Dana Desa untuk menunjang operasional administrasi pemerintahan masih terbatas, dan Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa kepada masyarakat. Serta temuan yang ada di lapangan terkait dengan hambatan dalam pengelolan Dana Desa di Kampung Koya Koso Distrik Abepura Kota Jayapura.

Untuk mengetahui kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagaimana bagan di bawah ini :

Bagan 2.1

**Kerangka Berfikir Penelitian
Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Koya Koso Distrik Abepura
Kota Jayapura**



1.4 Definisi Variabel Penelitian

1.4.1 Definisi Konsep

Untuk mencegah salah dalam interpretasi atas istilah khususnya variabel penelitian, maka diuraikan dalam definisi konsep sebagai berikut :

“Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebagaranan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.

1.4.2 Definisi Operasional

Dengan definisi operasional yang jelas, penelitian akan dapat lebih mudah mengukur dan menganalisis Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung dan faktor yang mendukung dan menghambatnya.

“Manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)”.

Dengan Indikator :

- a. Perencanaan (*Planning*)
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)
- c. Pelaksanaan (*Actuating*)
- d. Pengawasan (*Controlling*)